



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia, taufik dan hidayahNya sehingga Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga dan sebagai kerangka penyesuaian dalam menentukan arah dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026 yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan Strategis, Program dan Kegiatan yang pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun ke depan sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas, terukur serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan tahun berikutnya.

Rancangan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk menata manajemen sumber daya manusia aparatur pegawai negeri sipil di Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng agar dapat memberikan pelayanan kepada publik secara profesional. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng lebih konkrit. Rancangan Rencana Strategis yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Kami menyadari Dokumen Rancangan Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan sarana untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka serta dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rancangan Rencana Strategis ini dapat berguna sebagai pedoman pembelajaran jangka panjang dalam pengembangan di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan perikanan serta sekaligus menjadi acuan Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Watansoppeng, 28 Juli 2021

**Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan
dan Perikanan Kabupaten Soppeng**



Ir. EPRMAN ASNAWL M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199703 1 007



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKA DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan Kabupaten Soppeng...	24
2.4 Anggaran dan Realisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan Kabupaten Soppeng.....	28
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
5.1 Strategi	60
5.2 Kebijakan.....	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	64
6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2021 – 2026	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
BAB VIII PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Inventaris Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	26
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	29
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	44
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	47
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	48
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	48
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Startegis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	49
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	53
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Berdasarkan Renstra Kementerian beserta Faktor yang Mempengaruhi	55
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	59
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	87
Tabel 7.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Didukung oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	88
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	88





Tabel 7.4	Indikator Kinerja Dinas Perternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	97
Tabel 7.5.	Indikator Kinerja Dinas Perternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017)	97
Tabel 7.6.	Indikator Kinerja Dinas Perternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Permendagri 18 Tahun 2020)	98





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng.....	20





DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	21
Grafik 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	21
Grafik 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Grafik 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	22
Grafik 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	22





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi. Renstra tersebut memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memiliki fungsi untuk : (1) Turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan selanjutnya akan mendaji pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, (2) Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dan (3) sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan





Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra meliputi 2 tahap, dimana dalam tahap pertama, mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Tahap Selanjutnya, menyusun rancangan Renstra SKPD – Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama.

Dalam Tahapan tersebut, terdapat langkah-langkah penyusunan Renstra yang diawali dengan menerima secara resmi rancangan awal RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dari Kepala Bappelitbangda; melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi KDH/WKDH sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD, SDM, Peralatan, Kebijakan, dan lain-lain).

Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD periode sebelumnya; menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai dengan kewenangan SKPD, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya; menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif; menetapkan lokasi rancangan kegiatan dalam memperhatikan rencana tata ruang; hal tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam Forum Renstra SKPD, kemudian disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Soppeng. Sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 sebagai bahan utama dalam Musrenbang RPJMD. Rancangan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra SKPD;

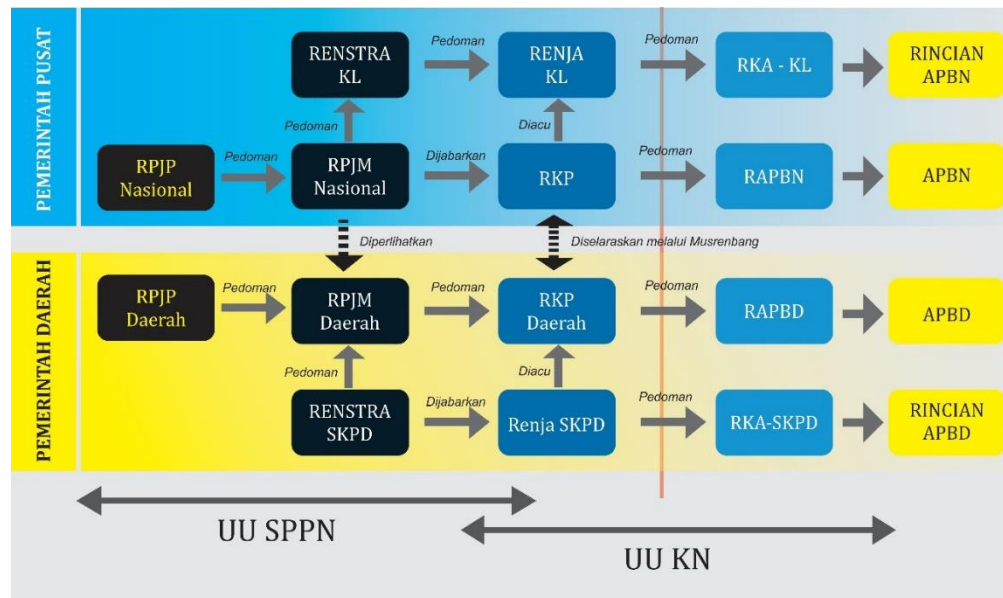
Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat diuraikan sebagai berikut: RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RPJPD Provinsi serta RPJPN. Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang; RPJMD akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra SKPD merupakan bagian integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja SKPD setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.





Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen



1.2 Landasan Hukum

Terdapat beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.





12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028.
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.





29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah kabupaten Soppeng Nomor 9 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021.
33. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 106).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yaitu untuk memacu penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin terciptanya sinergi antara kebijakan dan sinkronisasi program tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dan juga menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng.
2. Sebagai arah kebijakan dan Pedoman bagi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026.
3. Sebagai bahan dalam menilai kinerja, baik yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
4. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;





5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah;
6. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng setiap Tahunnya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng.

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Mengemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.





BAB VIII: Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dengan Tipe A merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab serta terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Soppeng tidak mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mampu menampilkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan output dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis.

Susunan organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan





3. Unsur Pelaksana yaitu :

- a. Bidang Peternakan dari 3 seksi yaitu :
 - Seksi Budidaya Peternakan
 - Seksi Pakan Ternak
 - Seksi Penyaluran dan Pengembangan Peternakan
- b. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan
 - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- c. Bidang Perikanan yang terdiri dari 3 Seksi yaitu :
 - Seksi Budidaya Perikanan
 - Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan
- d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan yang terdiri dari 3 Seksi yaitu :
 - Seksi Pengembangan dan Daya Saing Produk
 - Seksi Kelembagaan
 - Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi
- e. Unit Pelaksana Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terbagi atas 2 UPTD yaitu :
 - UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
 - UPTD Tempat Pelelangan Ikan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

1. Tugas dan Fungsi

KEPALA DINAS

- (1) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan





tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap dan daya saing produk;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya serta mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- h. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;





- i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- j. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan& kesmavet, perikanan dan binas usaha kelembagaan;
- k. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan& kesmavet, perikanan dan binas usaha kelembagaan;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan kepala bidang lingkup Dinas;
- m. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundangan-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian perencanaan dan pelaporan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian keuangan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;





- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibagian umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
- j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
- k. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BIDANG PETERNAKAN

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :





- a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang budidaya peternakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang pakan ternak;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang penyaluran dan pengembangan peternakan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
 - g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan penyiapan koordinasi budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi perumusan budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan;
 - j. Melaksanakan kebijakan budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan;
 - k. Melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan;
 - l. Melakukan monitoring, evaluasi kegiatan budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan;
 - m. Melaporkan budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan.





- n. Melaksanakan pengembangan pelaksanaan budidaya peternakan, pakan ternak dan penyaluran & pengembangan peternakan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN VETERINER MASYARAKAT

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang pengendalian dan pencegahan penyakit hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;





- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penyiapan koordinasi pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- i. Memfasilitasi perumusan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- j. Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- k. Melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- m. Melaporkan pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- n. Melaksanakan pengembangan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BIDANG PERIKANAN

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan yang meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi budidaya perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi pemberdayaan nelayan kecil;





- c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi perlindungan sumber daya ikan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
 - g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan sumber daya ikan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi perumusan kegiatan budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan sumber daya ikan;
 - j. Melaksanakan kebijakan budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan sumber daya ikan;
 - k. Melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan sumber daya ikan;
 - l. Melakukan monitoring, evaluasi kegiatan budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan sumber daya ikan;
 - m. Melaporkan kegiatan budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan sumber daya ikan.
 - n. Melaksanakan pengembangan pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil, dan perlindungan sumber daya ikan;





- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BIDANG BINA USAHA DAN KELEMBAGAAN

- (1) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang pengembangan dan daya saing produk, kelembagaan dan sarana prasarana dan pengembangan teknologi sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi pengembangan dan daya saing produk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi kelembagaan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas, petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya ;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bina usaha dan kelembagaan;





- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang bina usaha dan kelembagaan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang bina usaha dan kelembagaan;
- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang bina usaha dan kelembagaan;
- l. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang bina usaha dan kelembagaan;
- m. Melakukan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bina usaha dan kelembagaan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

UNIT PEMBANTU TEKNIS DINAS (UPTD)

- (1) UPT Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas. Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat pelelangan ikan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan.
 - Pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
 - Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan.
 - Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan.
 - Pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.





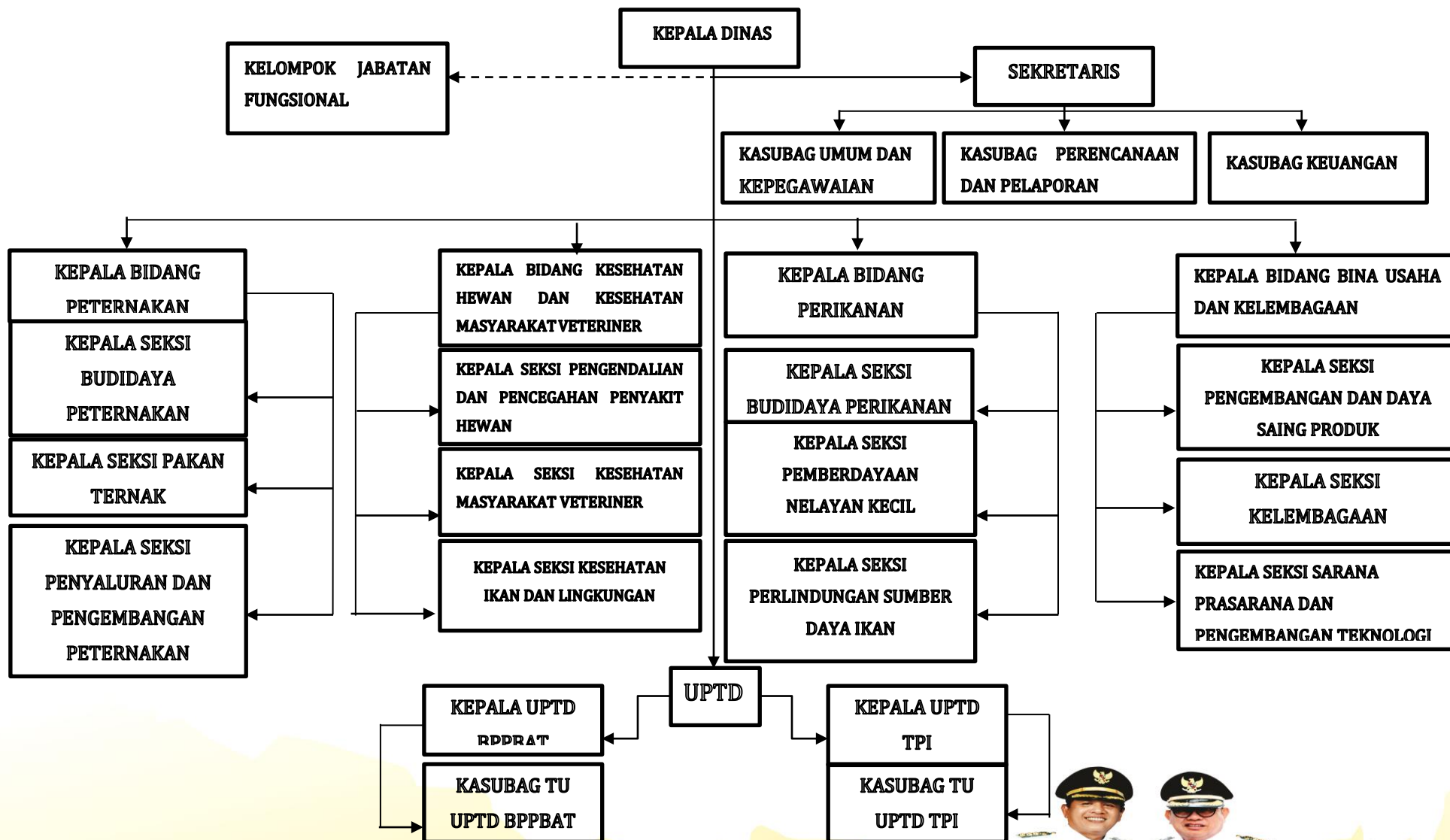
JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan





Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI



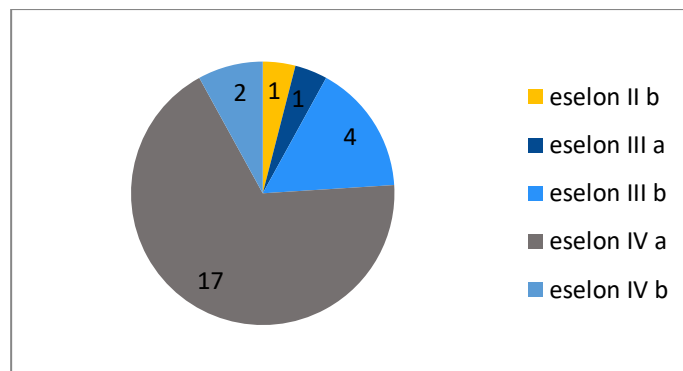


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

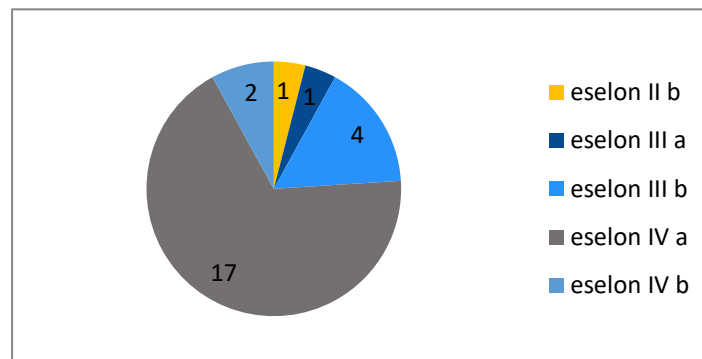
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan profesional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dibawah ini dijabarkan sesuai dengan klasifikasinya dengan menggunakan Data Kepegawaian Per 31 Desember 2020 :

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan



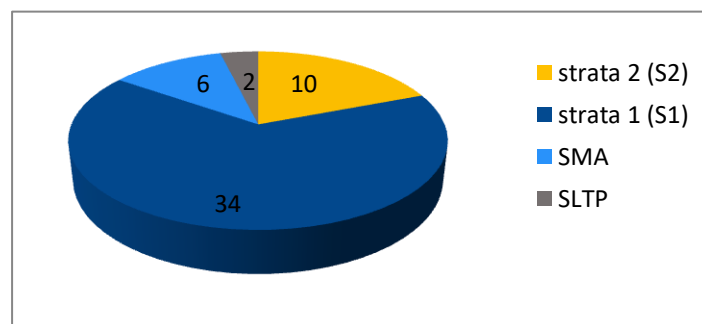
Sumber : kepegawaian DPKHP

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional



Sumber : kepegawaian DPKHP

Grafik 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

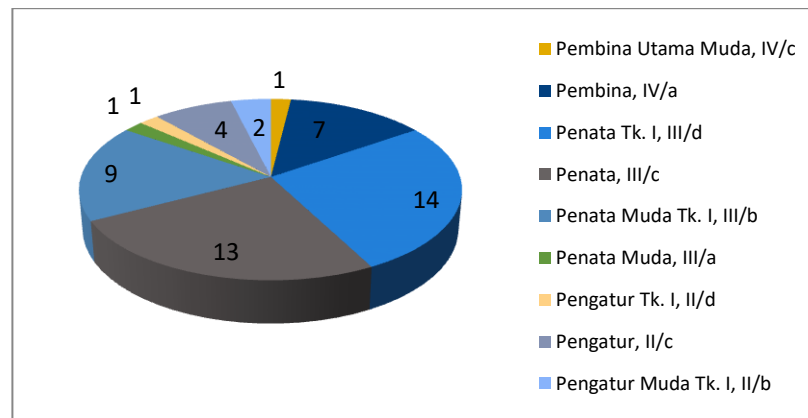


Sumber : kepegawaian DPKHP



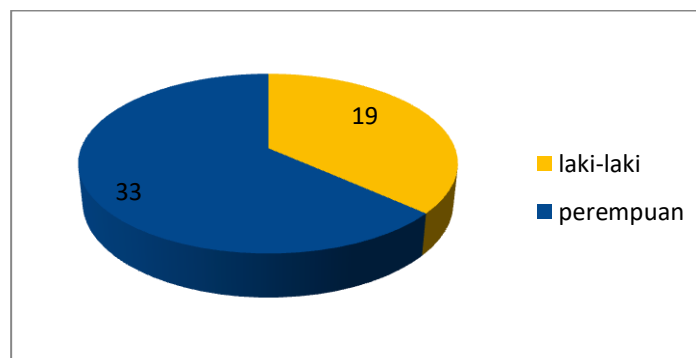


Grafik 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan



Sumber : kepegawaian DPKHP

Grafik 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : kepegawaian DPKHP

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng ini merupakan penunjang aparatur dalam meningkatkan kinerja dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah pengguna, agar jumlah barang yang tersedia tidak lebih dari jumlah penggunaannya, dan masih perlunya memperhatikan analisa kebutuhan barang, serta masih perlunya menginventarisasi barang berdasarkan kondisi akhir, sehingga kondisi akhir barang tersebut dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung kinerja organisasi atau perlu dilakukan pemeliharaan barang yang ada. Adapun pola distribusi barang ke pengguna, masih perlu difokuskan pada kondisi beban kerja yang lebih tinggi sehingga dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng, dibawah ini terdapat





Tabel 2.1 Daftar Inventaris Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2020.

Tabel 2.1
Daftar Inventaris Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

No.	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi				
			Baik	Kurang Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal)	1	1				
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	16	16				
3	Excavator	2	2				
4	Electric Generating Set	1	1				
5	Pompa	1	1				
6	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	2				
7	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2	2				
8	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35	35				
9	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	1				
10	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1	1				
11	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	2	2				
12	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	1	1				
13	Alat Ukur Universal	11	11				
14	Alat Timbangan/ Biara	9	9				
15	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3	3				
16	Alat Panen	4	4				
17	Alat Produksi Perikanan	8	8				
18	Alat – Alat Peternakan	40	40				
19	Mesin Ketik	5	5				
20	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	1				
21	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	32	32				
22	Alat Kantor Lainnya	47	47				
23	Meubelair	259	259				
24	Alat Pembersih	2	2				
25	Alat Pendingin	37	37				
26	Alat Dapur	14	14				
27	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12	12				
28	Kursi Rapat Pejabat	6	6				
29	Peralatan Studio Audio	5	5				
30	Peralatan Studio Video Dan Film	11	11				
31	Alat Komunikasi Telephone	5	5				
32	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	1	1				
33	Alat Kedokteran Umum	2	2				
34	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	2	2				
35	Alat Laboratorium Umum	19	19				
36	Alat Laboratorium Microbiologi	18	18				
37	Alat Laboratorium Kimia	2	2				
38	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	12	12				
39	Alat Laboratorium Lain	4	4				
40	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1	1				
41	Alat Laboratorium Penunjang	2	2				
42	Personal Komputer	51	51				
43	Peralatan Personal Komputer	28	28				
44	Bangunan Gedung Kantor	21	21				





No.	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi				
			Baik	Kurang Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Bangunan Gudang	1	1				
46	Bangunan Kesehatan	1	1				
47	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	1				
48	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar	1	1				
49	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	2	2				
50	Bangunan Peternakan/ Perikanan	10	10				
51	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18	18				
52	Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan	1	1				
53	Jembatan Labuh/ Sandar Pada Terminal	2	2				
54	Bangunan Pengambilan Irigasi	3	3				
55	Bangunan Pelengkap Irigasi	3	3				
56	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	13	13				
57	Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Air Baku	1	1				
58	Bangunan Pembawa Air Bersih/ Air Baku	2	2				
59	Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku	1	1				
60	Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	2	2				
61	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4	4				
62	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	2	2				
63	Jaringan Distribusi	10	10				
64	Ternak Potong	12	12				
65	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	1				
Jumlah		830	830				

1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan terdiri dari indikator kinerja menurut Permendagri 86 tahun 2017, indikator kinerja menurut Permendagri 54 tahun 2010, indikator kinerja menurut RPJMD, indikator kinerja menurut Renstra dan menurut Indikator Kinerja Khusus.

Pencapaian pelaksanaan kinerja pelayanan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menentukan kebijaksanaan pada bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan selama lima tahun terakhir (2016-2020) yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Target Indikator, Target Renstra, Capaian Realisasi serta Rasio antara Target yang dicapai dengan Realisasi per tahun cukup baik, terarah dan terukur yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Indikator yang digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, yang





dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya atau berdasarkan atas hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten, yang secara rinci dipaparkan pada tabel 2.2 dibawah ini:





Tabel 2.2 (T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

N O	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Realisasi dibagi Target)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Tingkat Produksi Hasil Peternakan																					
	a. Daging (Kg)				975.240	950.712	1.000.000	1.175.000	1.300.000	1.450.000	975.240	950.712	1.055.544	1.230.000	430.466		100	100	105,55	104,68	33,11	
	b. Telur (Kg)				5.348.043	5.262.530	5.130.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000	5.348.043	5.262.530	5.561.124	5.580.000	9.707.820		100	100	108,4	108,4	186,69	
2	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan				27	27	27	27	28	29	27	27	27	27	27		100	100	100	100	96,43	
3	Persentase Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis yang Tertangani				36	65,35	45	50	55	60	36	65,35	67,42	67	58		100	100	149,82	134	105,45	





N O	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Realisasi dibagi Target)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21
4	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)				140,74	144,97	149,31	153,79	158,41	163,16	522,7	529,53	150,17	46,01	21,99		371,39	365,27	100,58	0,30	13,57	
5	Konsumsi Ikan (Ton)				7.996,41	8.028,96	7.250	7.300	7.350	7.400	7.578,27	7.605,34	7.253,7	7.884,12	8.624,23		94,77	94,72	100,05	108	117,34	
6	Produktifitas Pembudidaya Ikan (Ton/Ha)				0,66	0,702	0,807	0,944	1,12	1,344	0,66	0,70	0,81	0,95	1,537		100	99,72	100,37	100,64	137,23	
7	PRoduktifitas Nelayan (Ton/Unit)				6,67	7,33	8,42	9,85	11,72	14,06	6,67	7,33	7,64	7,93	7,95		100	100	90,74	80,51	67,83	
8	Jumlah Unit Usaha Pengelola Hasil Perikanan (Unit)				10	15	20	25	30	35	10	15	20	25	25		100	100	100	100	83,33	
9	Persentase Aparatur yang Bekerja dengan Baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
10	Persentase Capaian Kinerja (IKU) Perangkat Daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	104,02	101,44		100	100	100	104,02	101,44	





Berdasarkan tabel di atas (T-C. 2.3), kinerja pelayanan SKPD pada umumnya menurun di Tahun 2020. Pada bidang peternakan, produksi daging menurun dari target produksi pada Tahun 2020 yaitu 1.300.000 Kg, realisasi hanya 430.466 Kg, menurun 33, 11% dari target karena masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, mengakibatkan frekuensi pemotongan ternak dan daya beli masyarakat berkurang begitupun jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan dari target 28 unit pada Tahun 2020 hanya 27 unit yang terealisasi. Di sisi lain, produksi hasil telur dan penanganan kasus penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani mengalami peningkatan, dimana produksi telur mencapai 186,69% dari target dan pelayanan penanganan kasus penyakit hewan meningkat sekitar 105,45% pada tahun 2020. Peningkatan produksi telur meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi ternak ayam.

Bidang Perikanan, Tahun 2020 produksi olahan hasil perikanan menurun dari 158,41ton terealisasi hanya 21,99 ton. Begitupun produktifitas nelayan dan jumlah unit usaha pengelola hasil perikanan mengalami menurun. Konsumsi ikan dan produktifitas pembudidaya ikan mengalami peningkatan sejalan dengan produksi ikan yang meningkat.

Pelayanan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai tugas dan fungsinya dengan persentase aparatur yang bekerja dengan baik mencapai 100%.

Pencapaian pelaksanaan kinerja pelayanan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menentukan kebijakan, terkhusus pada Tahun 2020 yang umumnya mengalami penurunan kinerja akibat pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan kegiatan dan pelayanan serta pengurangan anggaran kegiatan.

2.4 Anggaran dan Realisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

Kinerja pelaporan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yang juga dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :





Tabel 2.3 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
BELANJA LANGSUNG				3,691,918,400	2,269,020,660					3,340,299,949	2,215,232,496					90,48	97,63			
Program Pelayanan Perkantoran				478,219,600						445,829,399						93,23				
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59,183,000						44,454,789						75,11				
Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional				19,982,585						16,790,788						84,03				





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Layanan Kebersihan Kantor				10,100,000						10,062,500						99,63				
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				360,000						234,000						65,00				
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				214,000						214,000						100,00				
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1,280,000						1,280,000						100,00				
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya				178,724,210						177,009,422						99,04				





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				208,375,805						195,783,900						93,96				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				113,150,000						63,310,900						55,95				
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				3,600,000						3,389,400						94,15				
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor				7,500,000						7,490,500						99,87				
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				99,050,000						49,431,000						49,91				





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor				3,000,000						3,000,000						100,00				
Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur				117,918,000						111,080,400						94,20				
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				117,918,000						111,080,400						94,20				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan				14,914,800						14,914,800						100,00				
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9,819,900						9,819,900						100,00				





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				5,094,900						5,094,900						100,00				
Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap				2,028,982,100						1,854,355,100						91,39				
Kegiatan Pengembangan Perikanan (bibit ikan unggul air tawar)				673,165,000						671,313,000						99,72				
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan (DAK)				1,059,692,500						895,242,500						84,48				
Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP)				33,499,700						32,774,700						97,84				





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe				262,624,900						255,024,900						97,11				
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				121,449,900	64,740,000					110,949,900	63,390,000					91,35	97,91			
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Perikanan				94,037,500	13,800,000					85,687,500	12,600,000					91,12	91,30			
Kegiatan Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan				27,412,400	50,940,000					25,262,400	50,790,000					92,16	99,71			
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				241,150,000	529,170,000					171,389,500	519,552,700					71,07	98,18			





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pembinaan dan Perawatan Ternak				234,600,000	243,770,000					166,314,500	238,585,200					70,89	97,87			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bergulir				6,550,000	2,400,000					5,075,000	2,400,000					77,48	100,00			
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan					283,000,000						278,567,500						989,43			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				142,450,000	176,200,000					141,650,000	157,750,000					99,44	89,53			
Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan				48,400,000	7,450,000					48,400,000	0					100,00	0			





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak				94,050,000	148,750,000					93,250,000	147,950,000					99,15	99,46			
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				433,684,000	381,350,000					426,819,950	372,827,300					98,42	97,77			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna				433,684,000	381,350,000					426,819,950	372,827,300					98,42	97,77			
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan					459,810,660						450,486,276						97,97			
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					63,200,000						62,043,666						98,17			





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					21,179,410						13,657,360						64,48			
Kegiatan Layanan Kebersihan Kantor					12,500,000						12,500,000						100,00			
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					500,000						500,000						100,00			
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1,925,500						1,925,500						100,00			
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1,280,000						1,280,000						100,00			





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya					111,874,500						111,850,000						99,98			
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran					97,618,750						97,618,750						100,00			
Kegiatan Peralatan Gedung Kantor					63,200,000						62,600,000						99,05			
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor					10,000,000						10,000,000						100,00			
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					67,592,500						67,571,000						99,97			





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor					4,000,000						4,000,000						100,00			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					4,940,000						4,940,000						100,00			
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah					16,885,000						16,885,000						100,00			
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran					5,965,000						5,965,000						100,00			
Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja					3,212,500						3,212,500						100,00			





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan					3,492,500						3,492,500						100,00			
Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi					4,215,000						4,215,000						100,00			
Program Pengembangan Perikanan Budidaya					370,605,000						364,960,320						98,48			
Kegiatan Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)					357,265,000						351,620,320						98,42			
Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP)					5,250,000						5,250,000						100,00			





Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pengembangan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan					8,090,000						8,090,000						100,00			
Program Pengembangan Perikanan Tangkap					270,260,000						269,380,900						99,67			
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe					270,260,000						269,380,900						99,67			
BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,639,264,588	3,665,089,291					2,655,734,774	3,649,993,046					100,62	99,59			
TOTAL				6,331,182,988	5,934,109,951					5,996,034,723	5,865,225,542					94,71	98,84			





Tabel T-C. 24 berisi anggaran dan realisasi pendanaan yang menunjukkan bahwa Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng dapat dikatakan berkinerja cukup baik karena berada pada skala persentase 55,95% - 100%. Pada Tahun 2019 rata-rata persentase program 88% dan Tahun 2020 persentase mencapai 97%.

Pada tabel hanya menampilkan data dua tahun terakhir (2019-2021) karena Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan di tahun sebelumnya masih tergabung dalam dua dinas yang berbeda yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dengan adanya pembentukan kelembagaan baru tepatnya tanggal 1 Agustus 2019 terdapat beberapa program kegiatan pada Tahun 2019 yang tidak ada pada Tahun 2020. Akibatnya rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi tidak dapat dihitung pada beberapa program (Tabel T-C.24).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah, yaitu : minimnya dukungan pembiayaan dalam implementasi program dan kegiatan yang direncanakan, kemampuan aparat yang perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kinerja.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan, yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya ekonomi, politik, ideologi serta bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pembangunan, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng memilih peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang terus berkembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan sebagai lembaga pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajerial dalam membawa lembaga /organisasi untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng akan diuraikan sebagai berikut.





2.5.1 Tantangan (Threats)

Tantangan adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasaran. Tantangan yang dapat menghambat kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng adalah :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sektor peternakan dalam pembudidayaan ternak dan pengendalian penyakit.
- b. Masih terbatasnya lahan untuk peternakan termasuk pengembangan HMT, dipihak lain belum adanya koordinasi antar stakeholder dalam mengembangkan sistem usaha peternakan terintegrasi dalam pemanfaatan lahan
- c. Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat tiap tahun
- d. Adanya Perubahan nomenklatur kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng pada awal tahun 2020.
- e. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Sarana Prasarana, tidak sebanding dengan jumlah SDM ASN yang harusnya dipenuhi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2.5.2 Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasaran. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng adalah :

- a. Adanya kerjasama dengan Universitas Hasanuddin dalam pengembangan kawasan peternakan.
- b. Dukungan pemerintah pusat melalui APBN (UPSUS dan SIWAB) dan pelatihan SDM teknis IB
- c. Adanya teknologi yang selalu berkembang
- d. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan hewani.
- e. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik; makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk hewani olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.





Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi dimaksud harus berlandaskan pada Rencana Strategis yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan suatu pola yang disusun secara terencana, sistematis dan matang yang mempertimbangkan semua aspek dan potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi termasuk isu-isu yang berkembang yang merupakan tantangan kebijakan mendasar yang dapat mempengaruhi suatu organisasi.

Kelembagaan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan tentu akan menemui berbagai macam permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu pula indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :





TABEL 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya nilai tambah produksi peternakan	Rendahnya kualitas, komoditas, produk, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan	Rendahnya nilai tambah produksi hasil peternakan yang dihasilkan oleh peternakan rakyat, mutu produk peternakan yang kurang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, kurangnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana peternakan (poskeswan dan RPH)
	Rendahnya kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan perikanan	Skala usaha di bidang perikanan dan pengetahuan teknis petani perikanan masih rendah	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha perikanan dengan konsep agribisnis

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Peran kelembagaan dan sumber daya perikanan masih rendah	Kurangnya kuantitas, kualitas serta daya saing produk perikanan	Kurangnya sarana dan prasarana di bidang perikanan (laboratorium ikan)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, sebagai berikut :

“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis Standar Pelayanan Minimal





(SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang.

2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat terutama sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro dan kecil, industri kecil dan rumah tangga, serta perdagangan. Pengembangan ekonomi ini diupayakan mengadopsi pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian yang memperhatikan presisi dan berkembangnya start-up UMKM yang inovatif khususnya di Kota Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten dan didukung oleh ekonomi kreatif dari simpul-simpul ibu kota kecamatan.

3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan dan komunikasi serta mendukung berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai potensi dan titik destinasi wisata.

4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level pemerintahan Kabupaten, Kecamatan hingga kelurahan serta Desa, dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng.

5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya yang relevan dengan kondisi Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan, maka Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan memiliki peran strategis sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Soppeng, khususnya pada Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat, melalui Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu:





Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Visi: Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi-2: Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat				
1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kurangnya pengawasan pemotongan ternak	Sarana pendukung belum memadai	Kebijakan pemerintah untuk pembangunan RPH, Pembinaan dan sosialisasi
		Kurangnya kualitas dan kuantitas ternak	Sistem pemeliharaan yang masih bersifat tradisional dan ekstensif, Lemahnya kelembagaan kelompok peternak, SDM yang terbatas	Pengembangan kawasan peternakan, Dukungan pemerintah melalui program UPSUS dan SIWAB
2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kurangnya prasarana peternakan	Prasarana pendukung belum memadai	Kebijakan pemerintah untuk pengadaan prasarana peternakan
3	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Belum optimalnya pengendalian penyakit hewan dan zoonosis	Kurang tenaga medik dan paramedik, kurang sarana dan prasarana penunjang kesehatan hewan	Terbukanya formasi tenaga medik dan paramedik, dukungan pemerintah dalam penyediaan vaksin dan obat-obatan hewan.
4	Program pengelolaan perikanan tangkap	Terbatasnya infrastruktur/sarpras dari perikanan budidaya dan tangkap	SDM yang terbatas, dan pengaruh iklim yang tidak mendukung	potensi pasar yang ada, Potensi lokasi sumber daya alam tersedia
5	Program pengelolaan perikanan budidaya			
6	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Masih minimnya SDM Terampil yang dapat mengakomodir pelaksanaan kegiatan	Masih rendahnya daya saing hasil olahan produk perikanan, peningkatan SDM, dan kurang fasilitas pendukung	Adanya motivasi untuk meningkatkan predikat penilaian dari sebelumnya, potensi pasar yang ada

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri

Telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng adalah Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang





Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/2020 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3.	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
		Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
		Tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan
		Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional
		Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
		Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1.	Peningkatan daya saing SDM KP dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2.	Peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
3.	Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan , yaitu optimalisasi konservasi dan keanekaragaman hayati	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja birokrasi KKP	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
		Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
		Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
		Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
		Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integrative
		Tatakelola pemerintahan yang baik





Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, maka perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan secara berkesinambungan.

1.3.2 Renstra Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Renstra Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Peningkatkan Produksi Ternak	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas						
			1.Sapi Potong	1.508.401	1.568.737	1.631.487	1.696.746	1.764.616	1.835.200
			2.Sapi Perah	1.731	1.800	1.872	1.947	2.025	2.106
			3. Kerbau	117.869	121.405	125.047	128.799	132.663	136.642
			4. Kuda	198.712	204.673	210.814	217.138	223.652	230.362
			5. Kambing	830.718	880.561	933.395	989.398	1.048.762	1.111.688
			6. Domba	897	987	1.085	1.194	1.313	1.445





N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
			7. Babi	774.212	805.180	837.388	870.883	905.719	941.947
			8. Ayam Buras	31.970.051	34.207.955	36.602.511	39.164.687	41.906.215	44.839.650
			9. Ayam Ras Pedaging	56.227.345	61.850.080	68.035.087	74.838.596	82.322.456	90.554.701
			10. Ayam Ras Petelur	12.426.412	13.420.525	14.494.167	15.653.700	16.905.996	18.258.476
			11. Itik	6.269.472	6.833.724	7.448.760	8.119.148	8.849.871	9.646.360
		Meningkatnya produksi Daging, Telur dan Susu	PProduksi Daging, Telur dan Susu						
			Produksi Daging (kg)	138.241.154	152.065.269	167.271.796	183.998.975	202.398.873	222.638.760
			1. Sapi Potong	20.671.244	21.911.519	23.226.210	24.619.782	26.096.969	27.662.787
			2. Kerbau	3.959.092	3.998.683	4.038.670	4.079.056	4.119.847	4.161.045





N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
			3. Kuda	1.538.295	1.692.125	1.861.337	2.047.471	2.252.218	2.477.439
			4. Kambing	1.105.300	1.116.353	1.127.517	1.138.792	1.150.180	1.161.681
			5. Domba	0	0	0	0	0	0
			6. Babi	5.984.292	6.463.035	6.980.078	7.538.484	8.141.563	8.792.888
			7. Ayam Buras	34.463.715	36.876.175	39.457.507	42.219.533	45.174.900	48.337.143
			8. Ayam Ras Pedaging	56.994.848	62.694.333	68.963.766	75.860.143	83.446.157	91.790.773
			9. Ayam Ras Petelur	9.103.589	9.831.876	10.618.426	11.467.900	12.385.332	13.376.159
			10. Itik	3.103.389	3.382.694	3.687.136	4.018.979	4.380.687	4.774.949
			Produksi Telur (kg)	153.079.468		181.873.716	198.242.351	216.084.162	
			1. Ayam Buras	20.700.608	22.770.669	25.047.736	27.552.509	30.307.760	33.338.536





N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
			2. Ayam Ras Petelur	93.570.882	101.056.553	109.141.077	117.872.363	127.302.152	137.486.324
			3. Telur Itik	40.212.393	44.233.632	48.656.996	53.522.695	58.874.965	64.762.461
			Produksi Susu (kg)						
			1. Susu Sapi Perah	3.115.800	3.240.432	3.370.049	3.504.851	3.645.045	3.790.847
		Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis	Jumlah Kasus yang sakit/mati	7	6	5	5	4	4
	Peningkatan Kesejahteraan Petani Pernak		Jumlah Unit Usaha Pengolahan hasil Ternak dan Kelompok Tani/Ternak yang di Bina dan di Kembangkan						
		Meningkat nya Produk Pernakan yang (Asuh) dan Berdaya Saing	Jumlah RPH yang bersertifikat halal (unit)	2	2	3	4	4	4
		Meningkatnya jumlah unit usaha dan kelompok tani yang dibina	1. Jumlah unit usaha pengolahan hasil ternak	144	160	175	192	210	223





N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
			2. Kelompok tani / ternak dibina	1.187	1.216	1.238	1.262	1.293	1.315
			3. NTP-Pt	108,62	109	109	109	109	109

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1)	2)	3)	(4)	5)	6)	7)	8)	9)
	Pengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup		Pertumbuhan PDRB Sulsel	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3
1		Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perikanan berbasis sumberdaya alam	Pertumbuhan PDRB Perikanan	10,00	11,00	12,10	13,31	14,64
			Nilai hilirisasi produksi perikanan (Rp. Trilyun)	18.86	20.75	22.83	25.11	27.62
			Volume produksi Perikanan	4,920,204	5,614,824.5	6,413,160.63	7,330,831.50	8,385,710.02
			Perikanan Budidaya	4,609,988	5,301,486.20	6,096,709.13	7,011,215.50	8,062,897.82
			Perikanan Tangkap	366,356	370.649	374.942	79.253	83.528
			Nilai Produksi Perikanan (Rp. Trilyun)					
			Perikanan Budidaya	11.12	12.23	13.46	14.8	16.28
			Perikanan Tangkap	7.74	8.52	9.37	10.31	11.34
			Cakupan bina kelompok nelayan	30.18	33.2	36.51	40.17	44.18





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1)	2)	3)	(4)	5)	6)	7)	8)	9)
			Nilai Tukar Nelayan	107.79	107.89	108	108.11	108.22
			Nilai Tukar Pembudidaya	103.89	104.93	105.97	107.03	108.1
			Cakupan Pelabuhan perikanan yang beroperasional	52.17	65.22	78.26	86.96	100
			Jumlah produksi hasil tangkapan yang dibongkar di PP	17.898	18.076	18.254	18.433	18.6111
			Nilai produksi hasil tangkapan yang dibongkar di Pelabuhan Perikanan	222.8	243.8	264.8	285.8	306.8
			Jumlah kapal yang didaratkan dan bongkar muat di PP	15.87	16.029	16.186	16.345	16.503
			Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	293,001.5	322,301.7	354,531.8	389,985.0	428,983.5
			Konsumsi Ikan	53.6	54.1	54.6	55.2	55.7
			Volume Ekspor produk KP	181,439.50	199,583.45	219,541.80	241,495.97	265,645.57
			Nilai Ekspor Produk KP	388,769.70	427,646.67	470,411.34	517,452.47	69,197.72
			Nilai Tukar Pengolah	104.05	105.09	106.14	107.2	108.28
			Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial	20%	20%	20%	20%	20%
			Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	108,628	114,060	119,763	125,751	132,038
			Cakupan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali	20	20	20	20	20
			Produksi garam rakyat	47,504.5	52,254.9	57,480.4	63,228.5	69,551.3
			Cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil	48	60	74	90	100





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1)	2)	3)	(4)	5)	6)	7)	8)	9)
			Kerukanya tindakan IUU fishing	9.83	8.03	6.19	4.31	2.4
			Cakupan kasus illegal fishing yang dapat diproses melalui jalur hukum	17.34	17.69	18.04	18.41	18.77
			Cakupan bina kelompok masyarakat terhadap pengawasan	70.83	75	79.17	83.33	87.5
			Cakupan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	20	20	20	20	20

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis beberapa Kementerian tersebut, dan Renstra Provinsi maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng dapat dilihat pada Tabel 3.7. Sama halnya terhadap renstra Kementerian Pertanian dan KKP, maka Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng juga perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan secara berkesinambungan.

Tabel 3.7

Permasalahan pelayanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan berdasarkan Renstra Kementerian beserta faktor yang mempengaruhi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kementerian Kelautan dan Perikanan			
	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Bantuan modal, sarana dan prasarana serta bimbingan teknis	Anggaran untuk kegiatan tersebut terbatas	Dukungan anggaran





	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan pengelolaan SDA	Kurangnya kesadaran dalam hal pengelolaan SDA	Kebijakan dalam hal pengelolaan SDA
	Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Masih minim pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Anggaran untuk pelatihan pengelolaan sumber daya masih terbatas	Dukungan anggaran
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan	Masih minim pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Anggaran untuk pelatihan tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan masih terbatas	Dukungan anggaran
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif	Masih minimnya sumber daya manusia yang berkompeten	Anggaran untuk pelatihan peningkatan SDM masih terbatas	Dukungan anggaran

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Secara teknis kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan tidak terkait langsung dengan penerapan dokumen RTRW dan KLHS Pemerintah Daerah, namun demikian berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sangat berperan dalam menjaga implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang termuat dalam dokumen dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis lanjutan sebagai langkah-langkah efektif dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah yang termuat dalam dokumen RTRW dan KLHS. Tidak terlaksannya dokumen KLHS dan RTRW akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Selain itu Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan juga berperan dalam melaksanakan pemantauan terhadap implementasi kedua dokumen dimaksud, yang kemudian digunakan untuk menyusun kebijakan lanjutan terkait upaya supervisi kebijakan RTRW dan KLHS.





3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi yaitu :

a. Faktor Peluang :

1. Perlunya peningkatan dana untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun peningkatan keterampilan, melalui bimtek, diklat-diklat dan semacamnya.
2. Tingginya komitmen pimpinan untuk berupaya membenahi sarana dan prasarana pendukung tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Tingginya perhatian pimpinan untuk berupaya merumuskan sistem dalam rangka pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Masih sebagian besar pegawai menyadari akan tugas dan tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi yang diemban, sehingga masih terlihat motivasi kerja yang tinggi.

c. Faktor Ancaman

1. Belum sepenuhnya tercipta alur-alur mekanisme koordinasi baik antar bagian maupun lintas SKPD.
2. Masih lemahnya pengawasan, dan belum sepenuhnya dilakukan penerapan sangsi terhadap aparat yang kurang disiplin.
3. Tingkat kesejahteraan aparat belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga cenderung pegawai masih ada yang cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan demi untuk menambah penghasilan mereka.
4. Staf belum sepenuhnya memahami dengan jelas penjabaran tupoksinya.
5. Pelaksanaan Tugas dan fungsi belum dilengkapi dengan pedoman dan standar operasional prosedur.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka Tujuan Perangkat Daerah merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses pencapaian visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tujuan yang akan diwujudkan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi hasil peternakan
2. Meningkatkan produksi perikanan

Setelah merumuskan tujuan, maka fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait, juga telah dapat dicapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu bulan, semesteran, atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun (2021-2026) adalah sebagai berikut :





- Meningkatnya produksi hasil ternak
- Terkendalinya penyakit hewan dan zoonosis
- Meningkatnya produksi dan konsumsi perikanan

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

No.	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1 : Meningkatkan produksi hasil peternakan	LPE Subsektor Peternakan	1	2	2.5	3.25	3.5	3.75
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya produksi hasil ternak	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Ternak :						
		a.Produksi daging (%)	5,00	5,30	5,70	6,20	6,80	7,30
		b.Produksi telur (%)	0,80	1,00	1,30	1,60	2,00	2,50
		c.Produksi hasil ikutan lainnya (%)	4,00	4,30	4,70	5,20	5,80	6,30
	Sasaran 1.2 : Terkendalinya penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah Peningkatan ternak/ hewan yang kebal terhadap penyakit hewan menular strategis (ekor)	504,300	605,100	605,100	706,000	706,000	706,000
2	Tujuan 2: Meningkatkan Produksi Perikanan	LPE Subsektor Perikanan	14.07	14.23	14.38	14.54	14.70	14.86
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya produksi dan konsumsi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	1.01	1.01	1.01	1.015	1.015	1.02
		Konsumsi Ikan (Kg/Perkapita/ Tahun)	36.67	37.00	37.40	38.05	38.50	38.95
3.	Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan	Nilai Sakip Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	68 (B)	70 (B)	72 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK (%)	98	98	98	98	98	98
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (%)	77-79	79-81	81-83	83-85	85-87	87-90





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

5.1 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi adalah :





1. Melaksanakan kegiatan pengembangan peternakan dari hulu sampai hilir ;
2. Melaksanakan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan perikanan dari hulu sampai hilir;
4. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimtek pemanfaatan teknologi dalam rangka usaha pengolahan hasil perikanan

Untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hasil Peternakan dan Perikanan diperlukan upaya lebih konkrit dan terpadu dengan penerapan konsep agribisnis secara utuh dari hulu sampai hilir yaitu mulai dari Sub Sistem Penyediaan Sarana Produksi, Sub Sistem Usaha Peternakan dan Perikanan atau Proses Produksi, Sub Sistem Agroindustri/ Pengolahan Hasil, dan Sub Sistem Pemasaran serta Sub Sistem Penunjang lainnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng telah menetapkan strategi antara lain Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan, Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan serta Peningkatan penerapan teknologi dan sarana prasarana peternakan dan perikanan. Untuk penyempurnaan penetapan indikator kinerja, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng akan berupaya melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja.

5.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan kebijaksanaan strategis yang meliputi :

1. Pengembangan usaha peternakan dengan konsep agribisnis dan peningkatan partisipasi masyarakat
2. Intensifikasi IB dan Kawin Alam Serta Pencegahan Penyakit Reproduksi
3. Pengawasan pemotongan ternak (khususnya betina produktif)
4. Pengawasan lalu lintas ternak
5. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat dalam rangka pemberian informasi masalah penyakit hewan dan ikan, dan melakukan pencegahan penyakit dan vaksinasi;
6. Pencegahan penyakit hewan dan zoonosis serta vaksinasi
7. Pengembangan usaha perikanan konsep agribisnis





8. Penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang peternakan dan perikanan yang ditunjang dengan pengelolaan manajemen usaha yang professional;
9. Pencegahan penyakit ikan;
10. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan peningkatan konsumsi ikan;
11. Memanfaatkan sarana dan prasarana di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan
12. Meningkatkan penganekaragaman olahan hasil hewan berbasis bahan baku lokal;

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

Visi: Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera			
Misi-2: Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatkan produksi hasil ternak	Sasaran 1.1 : Meningkatnya produksi hasil ternak	Strategi 1.1 : Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengawasan peternakan dari hulu sampai hilir	Kebijakan 1.1.1: Pengembangan usaha peternakan konsep agribisnis dan peningkatan partisipasi masyarakat
			Kebijakan 1.1.2 : Intensifikasi IB dan Kawin Alam Serta Pencegahan Penyakit Reproduksi
			Kebijakan 1.1.3 : Pengawasan pemotongan ternak (khususnya betina produktif)
	Sasaran 1.2 : Terkendalnya penyakit hewan dan zoonosis	Strategi 1.2 : Melaksanakan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	Kebijakan 1.2: Pengawasan lalu lintas ternak
Tujuan 2 : Meningkatkan produksi perikanan	Sasaran 2.1 : Meningkatnya produksi dan konsumsi perikanan	Strategi 2.1 : Melaksanakan kegiatan pengembangan perikanan dari hulu sampai hilir	Kebijakan 1.2 : Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat dalam rangka pemberian informasi masalah penyakit hewan
			Kebijakan 1.3 : Pencegahan penyakit hewan dan zoonosis serta vaksinasi
			Kebijakan 2.1.1 : Pengembangan usaha perikanan konsep agribisnis
			Kebijakan 2.1.2 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang perikanan yang ditunjang dengan pengelolaan manajemen usaha yang professional
			Kebijakan 2.1.3 : Pencegahan penyakit ikan





Visi: Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera			
Misi-2: Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	3	4	5
		Strategi 2.2 : Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimtek pemanfaatan teknologi dalam rangka usaha pengolahan hasil perikanan	Kebijakan 2.2.1 : Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan peningkatan konsumsi ikan
			Kebijakan 2.2.2 : Memanfaatkan sarana dan prasarana di bidang perikanan sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan
			Kebijakan 2.2.3 : Meningkatkan penganekaragaman olahan hasil hewan berbasis bahan baku lokal;





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program dan Kegiatan Renstra 2021-2026

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Rencana program utama ada 6 (enam) dengan 12 (dua belas) kegiatan pokok serta 15 sub kegiatan yang ditunjang oleh 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) kegiatan serta 19 sub kegiatan yang bersifat rutin dan kelompok sasarannya berdasarkan prioritas dalam mencapai visi misi yang ada dalam RPJMD adalah sebagai berikut

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Indikatif yang akan dilakukan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1





Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan produksi hasil ternak							LPE Subsektor Peternakan	-1	1		2		2.5		3.25		3.5		3.75		3.75				
	Meningkatnya produksi hasil ternak						Persentase Peningkatan Produksi hasil Ternak (Produksi daging)	40.57 %	5.00 %		5.30 %		5.70 %		6.20 %		6.80 %		7.30 %		7.30 %				
							Persentase Peningkatan Produksi hasil Ternak (Produksi telur)	63.79 %	0.80 %		0.80 %		1.30 %		1.60 %		2.00 %		2.50 %		2.50 %				
							Persentase Peningkatan Produksi hasil Ternak (Produksi hasil ikutan lainnya)	30.23 %	4.00 %		4.00 %		4.70 %		5.20 %		5.80 %		6.30 %		6.30 %				
		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging, telur, dan hasil ikutannya		319,720,800		363,469,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000		550,000,000		2,583,189,800			





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Produksi daging (kg)	430,466	451,982		475,937		503,065		534,265		570,585		612,238		2,696,090				
							Produksi telur (kg)	9,707,820	9,785,483		9,883,338		10,011,821		10,172,010		10,375,451		10,634,837		51,077,457				
							Produksi hasil ikutan lainnya (kg)	88,470	92,009		95,969		100,479		105,701		111,827		118,872		532,848				
		3	27	02	2.03	Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota			-	-		363,469,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000		550,000,000		2,263,469,000			
							Jumlah kelahiran ternak sapi hasil IB (ekor)	250	-	-	349		414		486		567		657		2,473				





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	27	02	2.03	01		Jumlah kelompok penerima bibit ternak yang disebar (kelompok)	6 kelompok	.	.	2 kelompok		3 kelompok		3 kelompok		3 kelompok		3 kelompok		14 kelompok			
								Jumlah luas lahan HPT (ha)	425,97	.	.	465,97		485,97		505,97		535,97		545,97		545,97			
								Jumlah unit usaha (toko/ poultry shop) yang diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan (unit)	11	.	.	22		29		32		37		43		43			
		3	27	02	2.03	01	Pengawasan mutu benih/ bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil			.	.	363,469,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000		550,000,000		2,263,469,000		Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan
								Jumlah kelahiran ternak sapi hasil IB (ekor)	250	.	.	349		414		486		567		657		2,473			





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
																								Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Jumlah kelompok penerima bibit ternak yang disebar (kelompok)	6 kelompok	-		2 kelompok		3 kelompok		3 kelompok		3 kelompok		3 kelompok		14 kelompok				
							Jumlah luas lahan HPT (ha)	425,97	-		465,97		485,97		505,97		535,97		545,97		545,97				
							Jumlah unit usaha (toko/ poultry shop) yang diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan (unit)	11	-		22		29		32		37		43		43				
		3	27	02	2.03		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota	1200	1200	319,720,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,720,800			





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	27	02	2.03	05	Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah IB Sapi	1200	1200	319,720,800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	319,720,800	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Marioriwawo, Kec. Liliriaja, Kec. Lilirilau, Kec. Lalabata, Kec. Marioriwawa, Kec. Donri-Donri	
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana (peternakan) yang digunakan	89,95	95	62,505,200	95	69,728,000	95	200,000,000	95	200,000,000	100	220,000,000	100	250,000,000	100	1,002,233,200		
		3	27	03	2.02		Pembangunan prasarana pertanian	Jumlah prasarana peternakan yang diadakan (unit)	6	1	62,505,200	1	69,728,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	220,000,000	1	250,000,000	4	1,002,233,200		
		3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi prasarana peternakan :			62,505,200		69,728,000		200,000,000		200,000,000		220,000,000		250,000,000		1,002,233,200	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Marioriwawa, Kec. Lalabata, Kec. Donri-Donri
							Jumlah prasarana kawasan peternakan Medde yang dibangun/ rehab		1		.		.		.		.		.		1				





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
								Jumlah prasarana rumah potong hewan yang dibangun/ rehab		.		.		1		1		1		1		1					
								Jumlah prasarana pasar hewan yang dibangun/ rehab		.		.		1		.		.		.		1					
								Jumlah prasarana kawasan kebun bibit rumput yang dibangun/ rehab		.		1		.		.		.		.		1					
	Terkendalinya penyakit hewan dan zoonosis							Jumlah Peningkatan ternak / hewan yang kebal terhadap penyakit hewan menular strategis	504.300 ekor	504.300 ekor		605.100 ekor		605.100 ekor		706.000 ekor		706.000 ekor		706.000 ekor							
		3	27	03			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis :			115,779,900		102,459,900		120,000,000		130,000,000		140,000,000		150,000,000		758,239,800				
						a. Rabies		0	0		0		0		0		0		0		0						
							b. Anthrax	0,02	0		0		0		0		0		0		0						





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
										Rencana Capaian															
										2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							c. Brucellosis	0,05	0,05		0,05		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04				
							d. Avian Influenza	0	0		0		0		0		0		0		0				
		3	27	03	2.01		Penjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kewan dan kesmavet (ekor)	1,200	1,200	108,869,900	1,300	95,549,900	1,300	100,000,000	1,400	100,000,000	1,400	110,000,000	1,500	110,000,000	6,900	624,419,800		
		3	27	03	2.01	01	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			108,869,900	95,549,900		100,000,000	100,000,000		110,000,000	110,000,000		624,419,800	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan				
							Jumlah HPR (hewan penular rabies) yang kebal terhadap rabies (ekor)	2,000	2,000		2,500		2,500		3,000		3,000		3,000		14,000				
							Jumlah ternak yang kebal terhadap Anthrax (ekor)	2,000	2,000		2,200		2,200		2,500		2,500		2,500		11,900				





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah ternak sapi yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi (ekor)	300	300		400		400		500		500		500		2,300			
								Jumlah unggas yang tahan terhadap penyakit AI (avian Influenza) (ekor)	500,000	500,000		600,000		600,000		700,000		700,000		700,000		3,300,000			
		3	27	04	2.04		Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah pemeriksaan sampel kesmavet (sampel)	20	20	6,910,000	20	6,910,000	20	20,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	40,000,000	130	133,820,000		
		3	27	04	2.04	02	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah ternak dan produk peternakan yang dikirim ke luar daerah (ekor)	850	900	6,910,000	950	6,910,000	1,000	20,000,000	1,050	30,000,000	1,100	30,000,000	1,100	40,000,000	5,200	133,820,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan
Meningkatkan produksi perikanan								LPE Subsektor Perikanan	13.92	14.07		14.23		14.38		15.54		14.70		14.86		14.86			





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya produksi dan konsumsi perikanan						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	0	1.01 %		1.01 %		1.01 %		1.015 %		1.015 %		1.02 %		1.02 %				
							Konsumsi Ikan	36 Kg/Perkapita/Tahun	36.67 Kg/perkapita/tahun		37 Kg/Perkapita/Tahun	37.40 Kg/Perkapita/Tahun	38.05 Kg/Perkapita/Tahun	38.50 Kg/Perkapita/Tahun	38.95 Kg/Perkapita/Tahun	38.95 Kg/Perkapita/Tahun									
		3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	2,957.90	2,987.48	210,000,000	3,017.35	324,499,000	3,047.53	500,000,000	3,093.24	600,000,000	3,139.64	700,000,000	3,202.43	700,000,000	15,500.19	3,034,499,000		
		3	25	03	2.01		Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/ kota yang dikelola	1	1	210,000,000	1	154,499,000	1	270,000,000	1	340,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	5	1,774,499,000		
		3	25	03	2.01	02	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia	1	1	210,000,000	1	104,499,000	1	190,000,000	1	240,000,000	1	280,000,000	1	280,000,000	5	1,304,499,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Marioriaawa, Kec. Donri-DOnri





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	25	03	2.01	03	Penjamin ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	1	1	-	1	50,000,000	1	80,000,000	1	100,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	5	470,000,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Marioriawa, Kec. Donri-Donri
		3	25	03	2.02		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	2,957.90	2,987.48	-	3,017.35	50,000,000	3,047.53	80,000,000	3,093.24	100,000,000	3,139.64	120,000,000	3,202.43	120,000,000	15,500.19	470,000,000		
		3	25	03	2.02	01	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	3	-	-	3	50,000,000	3	80,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000	4	470,000,000	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Marioriawa, Kec. Donri-Donri
		3	25	03	2.03		Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	100	100	-	100	120,000,000	100	150,000,000	100	160,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	790,000,000		
		3	25	03	2.03	02	Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah tempat pelelangan ikan yang beroperasi	2	2	-	2	120,000,000	2	150,000,000	2	160,000,000	2	180,000,000	2	180,000,000	2	790,000,000	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Marioriawa





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penangg ung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	425.82	430.08	987,518,000	434.38	874,248,000	438.72	1.080,000,000	445.30	1.100,000,000	451.98	1.150,000,000	461.02	1.150,000,000	2,231.4	6,341,766,000		
		3	25	04	2.02		Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	5	5	557,108,000	5	494,248,000	5	595,000,000	6	600,000,000	6	620,000,000	6	620,000,000	6	3,486,356,000		
		3	25	04	2.02	01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah benih ikan yang dihasilkan (ekor)	8,000,000	8,400,000	557,108,000	8,820,000	494,248,000	9,261,000	595,000,000	9,724,050	600,000,000	10,210,253	620,000,000	10,720,765	620,000,000	48,736,068	3,486,356,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan
		3	25	04	2.04		Pengelolaan pembudidaya ikan	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil pembudidaya ikan	425.82	430.08	430,410,000	434.38	380,000,000	438.72	485,000,000	445.30	500,000,000	451.98	530,000,000	461.02	530,000,000	2,231.4	2,855,410,000		
		3	25	04	2.04	02	Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah prasarana pengembangan perikanan yang diadakan (paket)	1	1	261,270,000	1	200,000,000	1	300,000,000	1	310,000,000	1	330,000,000	1	330,000,000	5	1,731,270,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
																								Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	25	04	2.04	03	Penjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Tersedianya sarana usaha pembudidayaan ikan dalam kabupaten/ kota	1	1	169,140,000	1	180,000,000	1	185,000,000	1	190,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,124,140,00	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan
		3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proposal Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	125	125	116,499,400	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		116,499,400		
		3	25	05	2.01		Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	Jumlah sumber daya perikanan yang diawasi (lokasi)	2	2	116,499,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		116,499,400		





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	25	05	2.01	01	Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	Jumlah kawasan usaha perikanan tangkap yang diawasi (kawasan)	3	3		116,499,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		116,499,400	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Marioriawa Kel. Kaca dan Kel. Limpomajang
		3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Jenis Produk Olahan Hasil Perikanan	50	50		395,662,800	50	100	500,000,000	100	500,000,000	150	550,000,000	150	550,000,000	150	2,891,325,600		
		3	25	06	2.01		Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagu usaha skala mikro dan kecil	Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mendapatkan rekomendasi (unit usaha)	4	5		18,872,800	5	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	25	118,872,800		
		3	25	06	2.01	01	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1(satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah jenis data dan informasi yang disediakan (jenis)	3	3		18,872,800	3	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	118,872,800	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	25	06	2.02		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina (kelompok)	10	-	-	30	-	30	62,500,000	30	62,500,000	30	87,500,000	30	87,500,000	30	350,000,000		
		3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan dan persyaratan/ standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan dan penerapan inovasi produk pengolahan dan pengemasan hasil perikanan (kelompok)	10	-	-	15	-	20	62,500,000	20	62,500,000	30	87,500,000	30	87,500,000	30	350,000,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan
		3	25	06	2.03		Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan (jenis)	1	0	376,790,000	3	376,790,000	3	417,500,000	5	417,500,000	5	442,500,000	5	442,500,000	5	2,476,790,000		
		3	25	06	2.03	01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah paket hasil olahan ikan yang disediakan (paket)	4000	0	-	0	-	10,000	232,500,000	10,000	232,500,000	10,000	257,500,000	10,000	257,500,000	50,000	1,175,000,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	25	06	2.03	02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang diberikan fasilitas (unit/ kelompok)	1	2	376,790,000	1	376,790,000	1	185,000,000	1	185,000,000	1	185,000,000	1	185,000,000	5	1,301,790,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	8 Kecamatan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan								Nilai Sakip Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	65.17	68.00		70.00		72.00		74.00		75.00		76.00		76.00			
	Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan							Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	98.08	98.00		98.00		98.00		98.00		98.00		98.00		98.00			
								Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	NA	77-79		79-81		81-83		83-85		85-87		87-90		87-90			





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi									
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD								
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian kinerja penunjang urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	100	100	6.477,229,697	100	5,496,852,000	100	6,794,446,000	100	7,094,446,000	100	7,394,446,000	100	7,594,446,000	100	40,851,866,697									
		X	XX	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	100	17,517,100	100	22,340,400	100	41,900,000	100	42,400,000	100	48,900,000	100	55,900,000	100	228,957,500									
							Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100		
							Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
		X	XX	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	3	3	4,464,850	3	10,115,200	3	28,100,000	3	28,100,000	3	28,600,000	3	29,600,000	15	128,980,050	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau							





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (dokumen)	5	8	13,3052,250	8	12,225,200	8	13,800,000	8	14,300,000	8	20,300,000	8	26,300,000	40	219,977,450	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	100	5,099,361,117	100	5,043,887,908	100	5,058,292,813	100	5,065,292,813	100	5,065,992,813	100	5,066,992,813	100	30,399,820,277		
		X	XX	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (ASN)	50	50	5,068,268,817	51	5,017,495,608	51	5,017,495,463	51	5,017,495,463	51	5,017,495,463	51	5,017,495,463	51	30,155,746,277	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun (dokumen)	1	1	31,092,300	1	26,392,300	1	40,797,350	1	47,797,350	1	48,497,350	1	49,497,350	5	244,074,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.04		Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (%)	100	100	77,957	100	133,764	100	133,764	100	133,764	100	133,764	100	133,764	100	746,777		





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.04	01	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah objek retribusi yang dikelola (objek retribusi)	4	4	77,957	4	133,764	4	133,764	4	133,764	4	133,764	4	133,764	4	746,777	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100	100	319,542,650	100	164,349,990	100	750,157,760	100	776,957,760	100	840,767,760	100	916,457,760	100	4,515,141,450		
		X	XX	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/ penerangan bangunan yang tersedia (jenis)	1	1	496,800	1	496,800	1	4,803,400	1	5,803,400	1	7,803,400	1	10,303,400	1	29,707,200	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis)	11	11	71,888,500	4	1,074,000	8	4,885,500	8	5,885,500	9	10,885,500	9	13,885,500	9	108,504,500	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	1	1	22,400,000	1	12,400,000	1	14,100,000	1	14,800,000	1	15,800,000	1	16,300,000	5	95,800,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (jenis)	1	1	3,507,000	1	3,370,150	1	9,264,150	1	9,512,650	1	10,321,150	1	10,671,150	1	43,379,635,552	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.06	07	Penyediaan bahan/ material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan (paket)	3	3	34,736,750	3	15,585,640	3	76,592,910	3	90,444,410	3	120,445,910	3	139,785,910	3	447,591,530	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	283	433	186,495,600	248	131,423,400	691	640,511,800	692	650,511,800	693	675,511,800	695	725,511,800	3,462	3,009,966,200	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kab. Soppeng
		X	XX	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100	100	660,412,000	100	10,200,000	100	439,500,000	100	519,500,000	100	599,500,000	100	669,500,000	100	2,898,612,000		
		X	XX	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (jenis)	9	263	660,412,000	15	10,200,000	20	439,500,000	20	519,500,000	22	599,500,000	23	669,500,000	100	2,898,612,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	137,797,274	100	129,697,274	100	189,750,209	100	196,750,209	100	203,750,209	100	210,750,209	100	1,068,495,384		
		X	XX	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon, air, dan listrik (kali)	12	12	65,197,274	12	65,197,274	12	76,350,209	12	77,350,209	12	78,350,209	12	79,350,209	60	441,795,384	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
							Jumlah pemenuhan jasa air (kali)	12	12	12		12		12		60									
							Jumlah pemenuhan listrik (kali)	12	12	12		12		12		60									
		X	XX	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jpemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (jenis)	3	3	72,600,000	3	64,500,000	3	113,400,000	3	119,400,000	3	125,400,000	3	131,400,000	3	626,700,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100	100	242,539,599	100	126,242,664	100	314,711,454	100	493,411,454	100	635,401,454	100	674,711,454	100	2,487,018,079		
		X	XX	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik (unit)	38	38	46,583,813	38	33,867,593	38	109,884,848	38	134,884,848	38	164,884,848	38	167,194,848	38	657,300,798	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik(unit)	6	6	56,804,346	6	23,223,631	6	101,349,796	6	126,349,796	6	158,349,796	6	178,349,796	6	644,427,161	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang berfungsi dengan baik (unit)	6	6	56,221,440	6	56,221,440	6	81,756,810	6	101,756,810	6	131,756,810	6	146,756,810	6	574,470,120	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata Kel. Lalabatarilau





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capai an pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik (unit)	11	11	3,050,000	11	3,050,000	11	11,270,000	11	19,970,000	11	20,270,000	11	22,270,000	55	79,880,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau
		X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (m²)	525	525	79,880,000	225	9,880,000	225	10,450,000	225	110,450,000	225	160,140,000	225	160,140,000	225	530,940,000	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan dan Perikanan	Kec. Lalabata, Kel. Lalabatarilau



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Pada bab ini dibahas mengenai kesesuaian dan kesinergian serta sinkronisasi antara program dan kegiatan yang telah dirancang oleh unit kerja lingkup Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Pada bagian ini yang menjadi titik berat adalah indikator kinerja unit kerja lingkup Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng. Adapun indikator ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dimana merupakan ukuran atas keberhasilan yang diselenggarakan oleh masing-masing bagian.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dengan tetap mengacu pada target, sasaran dan tujuan dengan tingkat pencapaian yang maksimal yang tetap mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng yang disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan
1.	Meningkatnya produksi hasil ternak	Persentase peningkatan produksi hasil ternak :		
		Produksi Daging	DPKHP	$\frac{\sum \text{produksi tahun berjalan} - \sum \text{produksi tahun sebelumnya}}{\sum \text{produksi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Produksi Telur	DPKHP	$\frac{\sum \text{produksi tahun berjalan} - \sum \text{produksi tahun sebelumnya}}{\sum \text{produksi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Produksi Hasil Ikutan Ternak	DPKHP	$\frac{\sum \text{produksi tahun berjalan} - \sum \text{produksi tahun sebelumnya}}{\sum \text{produksi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
2	Terkendalnya penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah Peningkatan ternak / hewan yang kebal terhadap penyakit hewan menular strategis (ekor)	DPKHP	$\sum \text{ternak yang divaksin penyakit hewan menular strategis}$





No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan
3	Meningkatnya produksi dan konsumsi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	DPKHP	$\frac{\sum \text{produksi tahun berjalan}}{\sum \text{produksi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Konsumsi ikan	DPKHP	$\frac{(\sum \text{produksi perikanan budidaya} + \sum \text{produksi perikanan tangkap} + \sum \text{hasil olahan ikan} + \sum \text{ikan masuk})}{\text{Konsumsi ikan}}$
4	Meningkatnya kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	DPKHP	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK}}{\text{Jumlah aparatur pada DPKHP}} \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	DPKHP	Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 7.2
Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata (T-2.2) Indikator : Indeks Gini PDRB/kapita (Rp)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S-2.2.1) Indikator : Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Meningkatnya produksi hasil ternak (S.1.1) Indikator : Persentase peningkatan produksi hasil ternak : a. Produksi daging (%) b. Produksi telur (%) c. Produksi hasil ikutan lainnya (%) 2. Terkendalinya penyakit hewan dan zoonosis (S.1.2) Indikator : Jumlah Peningkatan ternak/ hewan yang kebal terhadap penyakit hewan menular strategis (ekor) 3. Meningkatnya produksi dan konsumsi perikanan (S.2.1) Indikator : a. Persentase peningkatan produksi perikanan (%) b. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD										
No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Bidang Peternakan									
	Produksi Daging, Telur dan Hasil Ikutannya									
	- Produksi daging	Kg	430,466	451,982	475,937	503,065	534,256	570,585	612,238	3,148,063





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	- Produksi telur	Kg	9,707,820	9,785,483	9,883,338	10,011,821	10,172,010	10,375,451	10,634,837	60,862,940
	- Produksi hasil ikutan lainnya	Kg	88,470	92,009	95,969	100,479	105,701	111,827	118,872	532,848
	• Jumlah Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB	Ekor	250	-	349	414	486	567	657	2,473
	• Jumlah Kelompok Penerima Bibit Ternak yang Disebar	Kelompok	6 kelompok	-	2 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	14 kelompok
	• Jumlah Luar Lahan HPT (Ha)	Ha	425,97	-	465,97	485,97	505,97	535,97	545,97	545,97
	• Jumlah Unit Usaha (toko/poultry shop) yang Diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan (Unit)	Unit	11	-	22	29	32	37	43	43
	- Jumlah Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB	Ekor	250	-	349	414	486	567	657	2,473
	- Jumlah Kelompok Penerima Bibit Ternak yang Disebar	Kelompok	6 kelompok	-	2 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	14 kelompok
	- Jumlah Luar Lahan HPT (Ha)	Ha	425,97	-	465,97	485,97	505,97	535,97	545,97	545,97
	- Jumlah Unit Usaha (toko/poultry shop) yang Diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan (Unit)	Unit	11	-	22	29	32	37	43	43





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupate/ kota	Dosis	1200	1200	-	-	-	-	-	-
	- Jumlah IB sapi	Dosis	1200	1200	-	-	-	-	-	-
2	Bidang Kesehatan Hewan									
	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis :	%								
	Rabies	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anthrax	%	0,02	0	0	0	0	0	0	0
	Brucellosis	%	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Avian Influenza	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan dan kesmavet	Ekor	1,200	1,200	1,300	1,300	1,400	1,400	1,500	8,100
	Jumlah HPR (Hewan Penular Rabies) yang Kebal Terhadap Rabies	Ekor	2,000	2,000	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	16,000
	Jumlah Ternak yang kebal terhadap Anthrax	Ekor	2,000	2,000	2,200	2,200	2,500	2,500	2,500	13,900
	Jumlah ternak sapi yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	Ekor	300	300	400	400	500	500	500	2,600
	Jumlah Unggas yang tahan terhadap penyakit AI (Avian Influenza)	Ekor	500,000	500,000	600,000	600,000	700,000	700,000	700,000	3,800,000
	Jumlah Pemeriksaan Sampel Kesmavet	sampel	20	20	20	20	30	30	30	150





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah ternak dan produk peternakan yang dikirim ke luar daerah	ekor	850	900	950	1000	1050	1100	1100	6,100
3.	Bidang Perikanan									
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2,957.90	2,987.48	3,017.35	3,047.53	3,093.24	3,139.64	3,202.43	18,488
	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/ kota yang dikelola	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6
	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6
	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6
	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	2,957.90	2,987.48	3,017.35	3,047.53	3,093.24	3,139.64	3,202.43	18,488
	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	Kelompok	3	3	3	3	4	4	4	4
	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang peroperasi	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	425.82	430.08	434.38	438.72	445.30	451.98	461.02	2,661
	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Kelompok	5	5	5	5	6	6	6	6
	Jumlah Benih Ikan yang dihasilkan	Ekor	8,000,000	8,400,000	8,820,000	9,261,000	9,724,050	10,210,253	10,720,765	57,136,068





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil pembudidaya Ikan	Ton	425.82	430.08	434.38	438.72	445.30	451.98	461.02	2,661
	Jumlah Prasarana - Pengembangan Perikanan yang Diadakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	6
	Tersedianya sarana usaha pembudidaya ikan dalam kabupaten/ kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	-	125	125	-	-	-	-	-	-
	Jumlah sumber daya perikanan yang diawasi	Lokasi	2	2	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kawasan usaha perikanan tangkap yang diawasi	Kawasan	3	3	-	-	-	-	-	-
4.	Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan									
	Persentase Peningkatan Jenis Produk Olahan Hasil Perikanan	%	50	50	50	100	100	150	150	150
	Jumlah Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Rekomendasi	Unit Usaha	4	5	5	5	5	5	5	30
	Jumlah Jenis Data dan Informasi yang Disediakan	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina	Kelompok	10	-	30	30	30	30	30	30





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan dan penerapan inovasi produk pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	Kelompok	10	-	15	20	20	30	30	30
	Jumlah Jenis Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jenis	1	-	3	3	5	5	5	5
	Jumlah Paket Hasil Olahan Ikan yang Disediakan (Paket)	Paket	4,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Diberikan Fasilitas	Unit/ kelompok	1	2	1	1	1	1	1	7
	Persentase prasarana (peternakan) yang digunakan	%	89.95	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah prasarana peternakan yang diadakan	Unit	6	1	1	1	1	1	1	6
	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi prasarana peternakan :									
	Jumlah prasarana kawasan peternakan medde yang dibangun/ rehab	Unit		1	-	-	-	-	-	-
	Jumlah prasarana rumah potong hewan yang dibangun/ rehab	Unit		-	-	1	1	1	1	1
	Jumlah prasarana pasar hewan yang dibangun/ rehab	Unit		-	-	1	-	-	-	1





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	- Jumlah prasarana kawasan kebun bibit rumput yang dibangun/rehab	Unit		-	1	-	-	-	-	1
5.	Sekretariat									
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	18
	- Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	Dokumen	5	8	8	8	8	8	8	48
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	ASN	50	50	51	51	51	51	51	51
	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Objek Retribusi yang terkelola	Objek Retribusi	4	4	4	4	4	4	4	4
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jenis alat listrik / penerangan bangunan yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	11	11	4	8	8	9	9	9
	Jumlah paket bahan logistik kantor	Paket	1	1	1	1	1	1	1	6
	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	3	3	3	18
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	283	433	248	691	692	693	695	3,452
	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dLm kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Jenis	9	263	15	20	20	22	23	100
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pemenuhan Jasa Telepon	Kali	12	12	12	12	12	12	12	72





No.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	
	- Jumlah Pemenuhan Jasa Air	Kali	12	12	12	12	12	12	12	72
	- Jumlah Pemenuhan Listrik	Kali	12	12	12	12	12	12	12	72
	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3
	• Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Berfungsi dengan baik	Unit	38	38	38	38	38	38	38	38
	- Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6
	- Jumlah Alat Besar yang berfungsi dengan baik	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang berfungsi dengan baik	Unit	11	11	11	11	11	11	11	11
	- Luas Gedung Kantor yang Dipelihara	m ²	525	525	225	225	225	225	225	225





Tabel 7.4 (T-C. 28)
Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	425.82	430.08	434.38	438.72	445.30	451.98	461.02	2,661
2.	Persentase peningkatan produksi hasil ternak								
	-Produksi daging (kg)	430,466	451,982	475,937	503,065	534,256	570,585	612,238	3,148,063
	-Produksi telur (%)	9,707,820	9,785,483	9,883,338	10,011,821	10,172,010	10,375,451	10,634,837	60,862,940
	-Produksi hasil ikutan lainnya (%)	88,470	92,009	95,969	100,479	105,701	111,827	118,872	532,848
3.	Persentase prasarana (Peternakan) yang Digunakan	89.95	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100

Tabel 7.5
Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017)

No.	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Capaian	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Akhir 2026
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Produksi perikanan (%)	84,74	85	85	90	90	100	100	100
2.	Konsumsi Ikan (%)	117,34	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	0,00	10	10	10	10	10	10	10
	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	87,42	88	88	90	90	95	95	95
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	125	125	-	-	-	-	-	-
3.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14





Tabel 7.6
Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Capaian	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (Ton)	3383,72	3147,56	3451,73	3486,25	3538,54	3591,62	3663,45	3663,45
2.	Produksi perikanan tangkap (ton)	2,957.90	2,987.48	3,017.35	3,047.53	3,093.24	3,139.64	3,202.43	3,202.43
	Produksi perikanan budidaya (ton)	425.82	430.08	434.38	438.72	445.30	451.98	461.02	461.02
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	31,25	29,5	29,5	29,5	29	29	29	29

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng pada Tabel 7.1 diatas merupakan indikator dari program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Program Wajib) yang dilaksanakan oleh 4 (Empat) Bidang, yaitu : (1) Bidang Peternakan, (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, (3) Bidang Perikanan, dan (4) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan. Dan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yng merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat.





BAB VIII PENUTUP



Rencana Strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD dan merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng setiap tahunnya hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sehingga perencanaan yang dilakukan lebih terarah dan berkesinambungan dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Soppeng untuk lima tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 ini juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng ini sangat perlu dipahami oleh seluruh jajaran Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai tanggungjawab kinerja dalam mewujudkan “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Watansoppeng, 28 Juli 2021

Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng,



Ir. ERMAN ASNAWL M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 19670907 199703 1 007

